

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Dewi, L. K., dkk. (2022). *Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Kesbangpol: Studi implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017*. Gadjah Mada University Press.
- Komnas HAM RI. (2021). *Panduan pengawasan organisasi kemasyarakatan berdasarkan standar HAM internasional*. Komnas HAM.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Prayudi, dkk. (2022). *Peran organisasi masyarakat dalam negara* (Dr. Kris Nugroho, Ed.). Publica Indonesia Utama.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Ed. revisi, cet. ke-13). Rajawali Pers.
- Simbolon, M. M. (2015). *Hukum administrasi negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- van Wijk, H. D. (1985). *Hukum administrasi Belanda* (Abdul Manan, Terj.). Ghalia Indonesia.

- Abidin, A. Z., dkk. (2023). Peran organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *OJS Ekonomi UNBARI*, 5(2), 125-130.
- Adams, W. (2021). Pembatasan kebebasan berserikat menurut ICCPR: Studi kasus pengawasan ormas Indonesia. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 89-105.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Asshiddiqie, J. (2010). Kebebasan berserikat dalam konstitusionalisme Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 400-415.
- Herdiansyah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial*, 1(1), 1-15.
- Mudana, I G., & Soekarba, S. R. (2023). Telaah kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Res Publica: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 15(1), 25-40.
- Pertiwi, S. F., Herawati, N. R., & Erowati, D. (2023). Pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2022 (sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 210-226.

Susanti, B. (2020). Domestikasi ICCPR dan transformasi status hukum ormas. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 210–230.

Susanti, R. (2023). Implementasi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi tahun 2022. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11(2), 189–205.

C. Skripsi

Ardani. (2022). Pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Kesbangpol Kota Semarang [Skripsi, Universitas Diponegoro].

Atmojo, I. T. (2024). Pembinaan dan pengawasan ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi DKI Jakarta [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].

Hidayat, S., Nuradi, D., & Suhermanto. (2023). Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 [Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan].

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.

E. Website dan Sumber Online

Badan Kesbangpol Kota Semarang. (t.t.). SIDAPURMAS: Prosedur pendaftaran ormas.

https://kesbangpol.semarangkota.go.id/index.php/layanan_ormas/pendaftaran_ormas

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). Evaluasi efektivitas pengawasan ormas nasional 2023. Diakses dari <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2023-2.pdf>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024, Juni 1). Data ormas terdaftar nasional per 5 Maret 2024. Sorottajam.com. Diakses dari <https://www.sorottajam.com/public/news/tips-edukasi/data-kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-tembus-setengah-juta>

Kesbangpol Kota Semarang. (2024). Data ormas terdaftar Kota Semarang 2024. SIDAPURMAS.https://kesbangpol.semarangkota.go.id/index.php/layanan_ormas/pendaftaran_ormas

Polda Jawa Tengah. (2025, Juni 2). Menjelang akhir Operasi Aman Candi 2025, Polda Jateng ungkap 711 kasus premanisme. Kabar Ngetren. Diakses dari <https://www.kabarngetren.com/2025/06/polda-jateng-ungkap-711-kasus.html>

Polda Jawa Tengah. (2025, Mei 18). Polda Jateng tangkap empat anggota ormas GRIB Jaya perusak aset PT KAI di Semarang. Restabes Semarang Jawa Tengah. Diakses dari <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polda-jateng-tangkap-empat-anggota-ormas-grib-jaya-perusak-aset-pt-kai-di-semarang/>

Polda Jawa Tengah. (2025, Mei 21). Polda Jateng amankan enam orang oknum ormas terkait kasus penipuan dan pengerusakan. Restabes Semarang Jawa Tengah. Diakses dari <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/polda-jateng-amankan-enam-orang-oknum-ormas-terkait-kasus-penipuan-dan-pengerusakan/>